

PERSEPSI

SENIN 8 APRIL | TAHUN 2019

RKPD dan RAKOREV:

Bagaimana Mensinergikannya?

Ekonom FE UNG dan Evaluator Eksternal Bappenas Kinerja Pemda Tahun 2018

TULISAN ini merupakan "saripati" dari hasil rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) tahunan bidang ekonomi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (Biro P2E) Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dimana saya menjadi peserta aktif yang kerap disertai tugas menjadi pengkaji dari hasil paparan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Hasil kajian dijadikan rumusan rekomendasi yang akan disampaikan oleh Biro P2E ke rapat pimpinan pemerintah Provinsi Gorontalo. Paparan BPS dan BI sejatinya dapat menjadi tolak ukur kinerja bidang ekonomi dan kesejahteraan selama setahun, sekaligus dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

Namun jika saya melihat, pelaksanaan rakorev bidang ekonomi terkesan bukan sesuatu yang urgen atau penting, apalagi mau dijadikan acuan penyusunan RKPD, terasa terlalu tinggi ekspektasi saya dengan persoalan itu. Betapa tidak rakorev yang sejatinya dihadiri oleh pemerintah kabupaten/kota untuk level decision making hanya mengutus perwakilan. Tidak jauh berbeda, dinas atau badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo banyak yang tidak hadir, malahan kepala daerah juga boleh dikata tak menganggap sesuatu yang penting rakorev bidang ekonomi, padahal

indikator pencapaian RPJMD sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja pada umumnya bermuara pada indikator makro ekonomi (pertumbuhan, ketenagakerjaan, kemiskinan, inflasi, IPM, kinerja ekspor, perkembangan UMKM serta kegiatan-kegiatan yang bersifat sektoral). Bahkan dalam angan saya anggota legislatif yang membidangi masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat wajib hadir sehingga lebih fokus melakukan pengawasan dan mengarahkan alokasi anggaran pada sektor yang pencapaiannya belum optimal.

Asumsi saya hasil rakorev menjadi bantalan kebijakan pemerintah daerah sekaligus dasar penyusunan RKPD untuk penguatan dan perbaikan apa yang lemah selama tahun sebelumnya. Misalnya selama tahun 2018 dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mengalami perlambatan dari 6,51 persen dibanding tahun 2017 sebesar 6,73 persen. Penyebab ini perludilulas, setelah itu perlu sokongan kebijakan yang bersifat afirmatif sebab secara nasional pertumbuhan ekonomi naik, namun disaat yang sama Gorontalo sebaliknya. Belum lagi dari sisi produksi masih didominasi oleh pertanian, dari 38,01 % (2017) naik menjadi 38,66 % (2018) sementara sektor ini sudah "peak" dimana marginal productivity telah mengalami

diminishing return, artinya peningkatan satu

satuan input produksi tidak lagi dapat mengungkit produktivitas lebih tinggi dibanding periode-periode sebelumnya. Selain itu share sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB tidak lagi memiliki elastisitas terhadap kinerja makro ekonomi seperti pengurangan kemiskinan dan menekan angka pengangguran, sebab terlihat angka pengangguran terdidik cenderung meningkat. Itu artinya intervensi kebijakan di sektor pertanian yang terus naik tidak lagi bisa diandalkan untuk mengatasi masalah pengangguran terdidik.

Menghadapi situasi seperti itu maka sektor non pertanian khususnya sektor industri pengolahan diharapkan memiliki kontribusi signifikan, persoalannya kinerja sektor industri pengolahan share-nya hanya tumbuh kecil dari 4,09 % di tahun 2017 menjadi 4,11 % di tahun 2018. Sedangkan industri manufaktur kecil yang merupakan industri dasar yang sudah ada di Gorontalo dari dahulu mengalami penurunan produksi, seperti industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (-12,94%), industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (-6,00%) dan industri Alat Angkutan Lainnya (-26,61%). Mengantisipasi lemahnya kinerja industri pengolahan serta menurunnya kinerja industri basis di Provinsi



Oleh
Muh. Amier Arham*

Gorontalo, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas UMKM dan Perindustrian Perdagangan perlu mendorong dan memfasilitasi kegiatan UMKM untuk jangka pendek, sementara industri besar perlu dibuat mapping dan rencana induk pengembangan industri. Tentu saja tak adalahnya bilamana saya bertanya, apakah data ini dijadikan rujukan oleh dinas terkait untuk menyusun RKPD tahun 2020?

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2018 mengalami perlambatan, selain dipicu melemahnya kinerja industri manufaktur kecil juga dipicu oleh turunnya kinerja sektor jasa, baik jasa perusahaan, keuangan, pemerintah dan jasa-jasa lainnya. Dengan dilandaskan pada kondisi tersebut maka dinas terkait perlu secara serius dan menjadikan dasar untuk menggiatkan kegiatan UMKM dengan ditunjang oleh digital economy. Hanya saja pengembangan digital economy masih

menghadapi berbagai macam tantangan, seperti ketersediaan sarana, aksesibilitas internet, SDM dan kualitas produk yang dapat diperdagangkan lewat digital economy. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu mempersiapkan sarana, penguatan aksesibilitas internet, pelatihan SDM, khususnya bagi angkatan kerja baru lulusan SLTA dan Perguruan Tinggi yang terus meningkat di Gorontalo. Digital economy yang terus tumbuh, sepertinya belum pernah dibicarakan secara serius oleh pemerintah, sebab selain makin mempermudah kegiatan transaksi ekonomi juga memunculkan ancaman pengangguran baru.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran pada tahun 2018 konsumsi rumah tangga menyumbang paling besar, yakni 61,59 % atau mengalami kenaikan 0,11 % dari tahun sebelumnya. Dominannya komponen ini menandakan bahwa perekonomian Gorontalo masih bersifat inward looking, sejatinya pembentukan modal diharapkan memiliki share yang besar, nyata komponen ini malahan share-nya menurun selama tiga tahun terakhir. Pembentukan modal baik dari pemerintah maupun swasta diyakini memberikan multiplier effect ekonomi. Sementara interaksi perdagangan internasional terus mengalami defisit, artinya kinerja dan peranan

komponen ekspor lebih kecil dibandingkan dengan share komponen impor. Menghadapi kondisi demikian maka Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota perlu mendorong perbaikan struktur anggaran dengan memperkuat belanja modal. Juga penting memikirkan, memetakan potensi apa yang dimiliki oleh Gorontalo untuk dapat diekspor, selama ini ekspor Gorontalo didominasi oleh jagung dan bungkil kelapa, dan ekspor jagung terpaku pada satu pasar, yakni Filipina.

Diluar masalah pertumbuhan ekonomi yang perlu diseriisi, serta dijadikan pijakan penyusunan RKPD yakni masalah kemiskinan. Angka kemiskinan pada kenyataannya mengalami penurunan, September 2018 sebesar 15,83 persen, turun 0,98 poin dibandingkan Maret 2018. Hanya saja bila dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari 0,750 pada Maret 2018 menjadi 0,829 pada September 2018. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antar sesama penduduk miskin itu semakin melebar. Atas dasar itu Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya kepada dinas terkait perlu mengkaji secara mendalam penyebab melebarnya gap pengeluaran antar kelompok masyarakat miskin, khususnya di wilayah perdesaan.

S e m e n t a r a i t u

permasalahan ketimpangan juga menjadi hal yang serius perlu diperbaiki, sebab pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,417. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,014 jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2018, apalagi daerah perdesaan kondisi September 2018, Gini Rasio adalah sebesar 0,413 mengalami peningkatan 0,03 poin dibanding Maret 2018 yang sebesar 0,383 serta meningkat 0,034 poin dibanding September 2017 yang sebesar 0,379. Ketimpangan perdesaan yang meningkat dapat menciptakan anomali, karena itu perlu memastikan bahwa pemanfaatan dana desa perlu diperkuat untuk kegiatan pemberdayaan dengan asumsi melibatkan seluruh masyarakat desa, sementara pembangunan infrastruktur dasar perdesaan lebih diperkuat pembiayaannya dari APBD. Apakah ini semua telah dipikirkan jalan keluarnya serta diakomodasi dalam RKPD tahun 2020, entah sebab kami rakyat dan akademisi hanya diundang pada saat konsultasi publik untuk mendengar arah kebijakan pemerintah daerah, bukan membaca detil program pemerintah daerah untuk memperbaiki masalah-masalah yang muncul ditahun 2018.

*Penulis Adalah
Akademisi Universitas
negri Gorontalo.*